

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENINGKATKAN LITERASI MASYARAKAT DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Ahmad Fathoni¹, H. Asmui²
Universitas Lambung Mangkurat
e-mail: tonibarabai@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi kebijakan dalam meningkatkan literasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan fokus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta berbagai lembaga pendidikan dan komunitas yang terlibat dalam pelaksanaan program literasi. Informan penelitian terdiri atas unsur pemerintah daerah, pustakawan sekolah, pengelola perpustakaan, duta baca, dan pelaku literasi lainnya. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan literasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi implementasi kebijakan dalam meningkatkan literasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilaksanakan melalui pembinaan perpustakaan sekolah dan desa, peningkatan kapasitas pustakawan, pengadaan koleksi dan pengembangan layanan perpustakaan, sosialisasi dan edukasi literasi, kegiatan literasi berbasis inklusi sosial, serta penguatan peran duta baca dan kegiatan lomba literasi. Implementasi kebijakan tersebut didukung oleh komitmen pemerintah daerah, keterlibatan sekolah dan komunitas literasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta berbagai program literasi yang inovatif. Adapun faktor penghambat yang masih dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, rendahnya minat baca masyarakat, serta belum meratanya akses layanan literasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan literasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas literasi masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan penguatan sumber daya, pemerataan layanan, serta keberlanjutan program agar tujuan peningkatan literasi masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Literasi Masyarakat, Strategi Literasi, Perpustakaan Daerah, Hulu Sungai Tengah.

ABSTRACT

This study aims to analyze policy implementation strategies for improving community literacy in Hulu Sungai Tengah Regency and to identify the factors that support and hinder their implementation. This study employs a qualitative approach using a descriptive research design. The study was conducted in Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan Province, focusing on the Hulu Sungai Tengah Regency Library and Archives Office as well as various educational institutions and communities involved in the implementation of literacy programs. Research informants included local government officials, school librarians, library managers, reading ambassadors, and other literacy practitioners. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The data were then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing

conclusions to obtain a comprehensive picture of the implementation of literacy policies in Hulu Sungai Tengah Regency.

Research findings indicate that policy implementation strategies to improve community literacy in Hulu Sungai Tengah Regency are carried out through the development of school and village libraries, capacity building for librarians, the acquisition of collections and the expansion of library services, literacy outreach and education, social inclusion-based literacy activities, and the strengthening of the role of reading ambassadors and literacy competitions. The implementation of these policies is supported by the commitment of the local government, the involvement of schools and literacy communities, human resource capacity building, and various innovative literacy programs. The constraints still faced include limited human resources, budget constraints, inadequate facilities and infrastructure, low public interest in reading, and unequal access to literacy services. Based on the research findings, it can be concluded that the implementation of literacy policies in Hulu Sungai Tengah Regency has proceeded quite well and has had a positive impact on increasing community literacy activities. However, it is still necessary to strengthen resources, ensure equitable service distribution, and ensure program sustainability so that the goal of improving community literacy can be achieved more optimally.

Keywords: Policy Implementation, Community Literacy, Literacy Strategies, Regional Library, Hulu Sungai Tengah.

PENDAHULUAN

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara harapan pemerintah dalam meningkatkan literasi masyarakat melalui pelayanan perpustakaan daerah dengan kondisi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang masih menunjukkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam memahami, mengakses, dan merespons informasi maupun kebijakan publik. Padahal, pemerintah telah menegaskan pentingnya penguatan literasi melalui pendidikan dan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014.

Pembangunan manusia merupakan tujuan utama penyelenggaraan negara yang menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fokus pembangunan nasional. Amanat tersebut tercermin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dalam konteks global, UNESCO (2017) mendefinisikan literasi sebagai kemampuan memahami, mengelola, dan memanfaatkan informasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Penerapan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih responsif terhadap kondisi lokal, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif (Dwiyanto, 2018; Nugroho, 2017). Oleh karena itu, kualitas administrasi publik menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan publik merupakan instrumen utama pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat (Anderson, 2015). Namun, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, melainkan juga oleh proses implementasinya (Hill & Hupe, 2021). Banyak kebijakan telah disusun secara formal, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan dampak yang diharapkan karena masih terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik pelaksanaannya (Wahab, 2016). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya strategi implementasi yang mampu menjembatani tujuan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan.

Pelaksanaan kebijakan literasi memerlukan strategi yang jelas agar tujuan kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam program yang terarah. Menurut Bryson (2018), strategi kebijakan merupakan pendekatan yang digunakan untuk menentukan prioritas dan langkah-langkah dalam mencapai tujuan organisasi. Strategi yang tepat akan meningkatkan konsistensi pelaksanaan kebijakan, sedangkan strategi yang lemah berpotensi menghambat pencapaian tujuan (Nugroho, 2017). Selain strategi, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, koordinasi, dan kolaborasi antarlembaga (Sedarmayanti, 2017; Pierre, 2020).

Keberhasilan kebijakan literasi juga tidak terlepas dari keterlibatan berbagai stakeholder, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perpustakaan, komunitas, dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam pendekatan administrasi publik modern, keterlibatan stakeholder menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan serta menjamin keberlanjutan program (Dwiyanto, 2018). Dengan demikian, strategi kebijakan, implementasi, tata kelola pemerintahan, dan peran stakeholder merupakan komponen yang saling berkaitan dalam mendukung peningkatan literasi masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji kebijakan literasi dari berbagai sudut pandang. Rodiyah dan Bolanitan (2024) menitikberatkan pada peningkatan literasi digital aparatur pemerintah desa dalam mendukung implementasi Sistem Informasi Desa. Idrus dkk. (2025) mengkaji peran kebijakan publik dalam meningkatkan literasi digital masyarakat pedesaan melalui pelatihan, penyediaan infrastruktur, dan kolaborasi pemerintah dengan komunitas lokal. Sementara itu, Suharyani dan Tamba (2017) mengevaluasi pelaksanaan program Kampung Literasi berdasarkan aspek sarana, proses, dan hasil peningkatan minat baca masyarakat. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan literasi masyarakat dalam perspektif administrasi publik dengan menganalisis secara terpadu strategi kebijakan, implementasi kebijakan, tata kelola pemerintahan, koordinasi antarperangkat daerah, serta peran stakeholder. Pendekatan tersebut menjadi kebaruan penelitian karena memberikan analisis yang lebih sistemik terhadap penyelenggaraan kebijakan literasi di tingkat daerah.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program peningkatan literasi masyarakat melalui peran perpustakaan daerah dan perangkat daerah terkait. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut masih memerlukan kajian yang komprehensif untuk mengetahui bagaimana strategi kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan didukung oleh tata kelola pemerintahan serta keterlibatan stakeholder dalam meningkatkan literasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi dan

implementasi kebijakan peningkatan literasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam perspektif administrasi publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam strategi dan implementasi kebijakan peningkatan literasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali proses kebijakan, pengalaman para pelaksana, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan literasi.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan literasi. Informan meliputi pejabat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pengelola perpustakaan sekolah, pengelola perpustakaan berbasis keagamaan dan masyarakat, serta Duta Baca Daerah, dengan total 16 informan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, data statistik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi nonpartisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai strategi kebijakan, implementasi, tata kelola pemerintahan, dan peran stakeholder. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan program literasi di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang memadai.

PEMBAHASAN

1. Strategi Implementasi Kebijakan dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1.2 Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Desa

Pembinaan perpustakaan sekolah dan desa merupakan strategi utama dalam implementasi kebijakan literasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dilakukan secara berkelanjutan melalui bimbingan teknis (BIMTEK), monitoring, evaluasi, pendampingan, serta forum Kelompok Kerja Perpustakaan (KKP). Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pengelola perpustakaan, memperbaiki administrasi, serta mengoptimalkan fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran.

Di tingkat sekolah, pembinaan diwujudkan melalui pembiasaan membaca, literasi pagi, integrasi perpustakaan dengan pembelajaran, serta penguatan layanan

perpustakaan. Pelaksanaan pembinaan melibatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sekolah, pemerintah desa, komunitas literasi, dan Duta Baca sehingga tercipta kolaborasi dalam pengembangan budaya literasi. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, fasilitas, dan rendahnya minat baca masyarakat sehingga diperlukan pembinaan yang lebih berkelanjutan.

1.3 Peningkatan Kapasitas Pustakawan

Peningkatan kapasitas pustakawan dilakukan melalui pelatihan, workshop, BIMTEK, pendampingan, monitoring, dan forum Kelompok Kerja Perpustakaan (KKP). Program tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan, pelayanan kepada pemustaka, serta pengembangan inovasi layanan literasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dan profesionalisme pustakawan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah tenaga pustakawan, kompetensi teknis yang belum merata, serta keterbatasan anggaran yang memengaruhi efektivitas pengembangan kapasitas.

1.4 Pengadaan Koleksi dan Pengembangan Layanan Perpustakaan

Pengadaan koleksi dan pengembangan layanan perpustakaan dilakukan melalui penyediaan koleksi sesuai kebutuhan pengguna, pengembangan layanan digital, peningkatan fasilitas, serta integrasi perpustakaan dengan kegiatan pembelajaran. Selain layanan konvensional, perpustakaan juga mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi.

Meskipun berbagai inovasi telah dilaksanakan, pengembangan layanan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan koleksi terbaru, layanan digital yang belum optimal, keterbatasan anggaran, serta minimnya sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengembangan koleksi dan layanan perpustakaan perlu terus ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.5 Sosialisasi dan Edukasi Literasi

Sosialisasi dan edukasi literasi dilaksanakan melalui penyuluhan, kegiatan sekolah, kunjungan literasi, perpustakaan keliling, media sosial, serta pemanfaatan perpustakaan digital. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya budaya membaca dan kemampuan memanfaatkan informasi secara kritis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat masih belum merata dan jangkauan layanan belum sepenuhnya menjangkau wilayah terpencil sehingga diperlukan strategi komunikasi yang lebih luas dan berkelanjutan.

1.6 Kegiatan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Literasi berbasis inklusi sosial dilaksanakan melalui kegiatan membaca bersama, mendongeng, pelatihan keterampilan, pameran karya, kunjungan literasi, serta berbagai kegiatan edukatif yang melibatkan masyarakat tanpa membedakan latar

belakang sosial. Pendekatan ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan literasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa program tersebut mampu meningkatkan kunjungan perpustakaan, minat baca, kreativitas, dan partisipasi masyarakat. Namun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan belum meratanya jangkauan layanan, khususnya di wilayah pelosok.

1.7 Peran Duta Baca dan Kegiatan Lomba Literasi

Duta Baca berperan sebagai penggerak budaya literasi melalui sosialisasi, kampanye membaca, serta berbagai kegiatan edukatif. Selain itu, penyelenggaraan lomba literasi menjadi media untuk meningkatkan minat baca, kreativitas, dan partisipasi masyarakat, khususnya pelajar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Duta Baca bersama sekolah, komunitas literasi, dan pemerintah daerah mampu meningkatkan motivasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan literasi. Namun demikian, pelaksanaan program masih memerlukan penguatan dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta perluasan jangkauan kegiatan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.

2. Pembahasan Berdasarkan Teori Implementasi George Edward III

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan literasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah memenuhi empat variabel implementasi kebijakan menurut George Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada aspek komunikasi, implementasi kebijakan dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, perpustakaan keliling, pendampingan, koordinasi, dan pemanfaatan media sosial. Strategi tersebut mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program literasi serta memperluas jangkauan informasi. Temuan ini sejalan dengan Edward III yang menegaskan bahwa komunikasi yang jelas, konsisten, dan berkelanjutan merupakan prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan.

Pada aspek sumber daya, implementasi kebijakan didukung oleh peningkatan kapasitas pustakawan melalui pelatihan, BIMTEK, workshop, dan Kelompok Kerja Perpustakaan, disertai penyediaan koleksi, layanan perpustakaan, dan dukungan berbagai pemangku kepentingan. Namun demikian, keterbatasan tenaga pustakawan, anggaran, fasilitas, serta koleksi perpustakaan masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dari sisi disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengembangkan budaya literasi melalui berbagai inovasi layanan, pembiasaan membaca, program literasi sekolah, dan kegiatan berbasis masyarakat. Sikap positif para pelaksana menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan meskipun masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan.

Sementara itu, struktur birokrasi telah berjalan cukup efektif melalui koordinasi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sekolah, perpustakaan desa, komunitas literasi, pemerintah desa, serta Duta Baca. Pembagian tugas yang jelas dan koordinasi lintas sektor mendukung pelaksanaan program literasi secara lebih terarah. Namun demikian, koordinasi antarlembaga dan pemerataan layanan hingga wilayah terpencil masih perlu diperkuat agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan peningkatan literasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan model implementasi kebijakan George Edward III. Keberhasilan tersebut didukung oleh komunikasi yang efektif, sumber daya yang relatif memadai, komitmen pelaksana yang tinggi, serta koordinasi antarorganisasi. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan anggaran, pengembangan sarana-prasarana, dan perluasan jangkauan layanan masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan literasi di masa mendatang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan peningkatan literasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi implementasi kebijakan dalam meningkatkan literasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilaksanakan melalui berbagai program yang terintegrasi, yaitu pembinaan perpustakaan sekolah dan desa, peningkatan kapasitas pustakawan, pengadaan koleksi dan pengembangan layanan perpustakaan, sosialisasi dan edukasi literasi, kegiatan literasi berbasis inklusi sosial, serta peran duta baca dan kegiatan lomba literasi. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, serta tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia dan peningkatan partisipasi masyarakat. Implementasi strategi ini telah mampu mendorong peningkatan minat baca, aktivitas literasi, dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam meningkatkan literasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah daerah, keterlibatan stakeholder seperti sekolah dan komunitas literasi, peningkatan kapasitas pustakawan melalui pelatihan, serta adanya program literasi yang inovatif dan variatif. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, keterbatasan koleksi perpustakaan, rendahnya minat baca masyarakat, serta

belum meratanya akses layanan literasi. Kombinasi kedua faktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan literasi telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan terutama pada aspek sumber daya dan pemerataan layanan agar tujuan peningkatan literasi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah. (2022). Public policy implementation effectiveness: A case study. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 25(2), 145–158.
- Amirullah. (2023). Assessing community participation in public policy-making in Indonesia. *International Journal of Multidisciplinary Research and Education*, 5(3), 211–220.
- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.
- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.).
- Barton, D., & Hamilton, M. (2018). *Local literacies: Reading and writing in one community* (2nd ed.). Routledge.
- Bovaird, T., & Löffler, E. (2016). *Public management and governance* (3rd ed.). Routledge.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Bryson, J. M., Edwards, L. H., & Van Slyke, D. M. (2018). Getting strategic about strategic planning research. *Public Management Review*, 20(3), 317–339. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1285111>
- Bryson, J. M., Quick, K. S., Slotterback, C. S., & Crosby, B. C. (2019). Designing public participation processes. *Public Administration Review*, 79(1), 23–34. <https://doi.org/10.1111/puar.13042>
- Cairney, P. (2021). *Understanding public policy: Theories and issues* (3rd ed.). Red Globe Press.
- Cairney, P., & Weible, C. M. (2020). The new policy sciences: Combining the cognitive science of choice, multiple streams, and institutional analysis. *Policy Studies Journal*, 48(4), 856–879. <https://doi.org/10.1111/psj.12376>
- Cepiku, D., Ferlie, E., & Sicilia, M. (2020). In search of convergence: Reforms in the Italian public sector. *International Review of Administrative Sciences*, 86(2), 257–274. <https://doi.org/10.1177/0020852318757069>
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.
- Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (2025). *Website resmi Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Diakses dari <https://disperpus.hstkab.go.id>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). Routledge.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson.

- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Edward III, G. C. (2019). *Implementing public policy*. CQ Press.
- Elbanna, S., Andrews, R., & Pollanen, R. (2016). Strategic planning and implementation success in public service organizations. *Public Management Review*, 18(7), 1017–1042. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051576>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C. W., & Licari, M. J. (2016). *The public administration theory primer* (2nd ed.). Westview Press.
- Freeman, R. E. (2015). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge University Press.
- George, B., Walker, R. M., & Monster, J. (2019). Does strategic planning improve organizational performance? *Public Administration Review*, 79(6), 810–819. <https://doi.org/10.1111/puar.13104>
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hanemann, U. (2016). The evolution of lifelong learning. *International Review of Education*, 62(3), 343–361. <https://doi.org/10.1007/s11159-016-9566-8>
- Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing public policy* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (3rd ed.). Sage Publications.
- Howlett, M. (2020). Designing public policies: Principles and instruments. *Policy Sciences*, 53(2), 237–256. <https://doi.org/10.1007/s11077-019-09372-0>
- Idrus, S. H., dkk. (2025). *The role of public policy in improving digital literacy in rural communities*. The Journal of Academic Science.
- Isabella, A., & Agustian, D. (2023). Implementing digital literacy policies and the challenges towards smart city in Palembang City. *Journal of Governance and Local Politics*, 5(2), 87–101.
- Isabella, A., Kusumasari, B., & Pramusinto, A. (2024). Navigating urgent digital literacy challenges for effective digital governance in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(1), 1–15.
- John Wiley & Sons. Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2017). *Exploring strategy* (11th ed.). Pearson Education.
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2020). Governance networks in the public sector. *Public Administration*, 98(1), 1–17. <https://doi.org/10.1111/padm.12611>
- Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2019). *Public policy: Politics, analysis, and alternatives* (6th ed.). CQ Press.

- Makhya, M., Mukhlis, M., & Tisnanta, S. (2022). Peningkatan literasi kebijakan publik pada masyarakat sipil di Lampung. *Seandanan: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 15–27.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.
- Mazzucato, M., & Kattel, R. (2020). COVID-19 and public-sector capacity. *Industrial and Corporate Change*, 29(3), 729–739. <https://doi.org/10.1093/icc/dtaa031>
- Meijer, A., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2020). Open government: Connecting vision and voice. *International Review of Administrative Sciences*, 86(3), 599–617. <https://doi.org/10.1177/0020852318804663>
- Miles, M. B, Huberman, A. M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook Edition 3*. USA : Sage Publications
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (2016). Toward a theory of stakeholder identification and salience. *Business Ethics Quarterly*, 26(2), 137–163. <https://doi.org/10.1017/beq.2016.15>
- Nugroho, R. (2017). *Public policy* (6th ed.). Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2017). *Public policy* (6th ed.). Elex Media Komputindo.
- Nur'aeni, R., dkk. (2025). *Enhancing community literacy through community engagement strategy: A descriptive study in community reading park*. Empowerment.
- O'Faircheallaigh, C. (2017). Public participation and environmental impact assessment. *Environmental Impact Assessment Review*, 62, 44–54. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2016.07.005>
- OECD. (2019). *OECD skills outlook 2019: Thriving in a digital world*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/df80bc12-en>
- OECD. (2020). *Public governance for the future*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/gov_future-2020-en
- Osborne, S. P. (2021). *Public service logic: Creating value for public service users, citizens, and society*. Routledge.
- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Strokosch, K. (2016). Co-production and the co-creation of value in public services. *Public Management Review*, 18(5), 639–653. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1111927>
- Pahl, K., & Rowsell, J. (2020). *Literacy and education: Understanding the new literacy studies*. SAGE Publications.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Strategi nasional literasi masyarakat*. Perpustakaan RI.
- Peters, B. G. (2018). *Advanced introduction to public policy*. Edward Elgar Publishing.
- Pierre, J. (2020). *Governance, politics and the state* (2nd ed.). Red Globe Press.

- Poister, T. H., Pitts, D. W., & Edwards, L. H. (2015). Strategic management research in the public sector. *The American Review of Public Administration*, 45(3), 321–339. <https://doi.org/10.1177/0275074014523131>
- Reed, M. S., et al. (2018). A theory of participation. *Journal of Environmental Management*, 211, 41–50. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.01.051>
- Rhodes, R. A. W. (2017). *Network governance and the differentiated polity*. Oxford University Press.
- Rodiyah, I., & Bolanitan, Z. O. (2024). *Enhancing digital literacy in village government for effective SID program implementation (Peningkatan literasi digital dalam aparat pemerintahan desa untuk implementasi program SID yang efektif)*. Indonesian Journal of Public Policy Review, 24. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v24i0.1335>
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2022). *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector* (9th ed.). Routledge.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2018). *Theories of the policy process* (4th ed.). Westview Press.
- Sari, N. (2021). *Literasi masyarakat dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah* (Tesis Magister Administrasi Publik). Universitas Indonesia.
- Schmeer, K. (2018). *Stakeholder analysis guidelines*. Policy Project.
- Sedarmayanti. (2017). *Good governance (kepemerintahan yang baik)*. Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2017). *Good governance (kepemerintahan yang baik)*. Mandar Maju.
- Stead, J. G., & Stead, W. E. (2019). *Sustainable strategic management* (2nd ed.). Routledge.
- Street, B. V. (2015). *Social literacies: Critical approaches to literacy in development, ethnography and education*. Routledge.
- Suharyani, & Tamba, I. W. (2017). *Evaluasi program kampung literasi dalam menumbuhkan minat baca masyarakat di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari*. Transformasi, 5(1), 65–76.
- Tachjan. (2018). *Implementasi kebijakan publik*. AIPI Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UNDP. (2015). *Governance for sustainable development*. United Nations Development Programme.
- UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2020). *Global education monitoring report on literacy*. UIL.
- UNESCO. (2017). *Reading the past, writing the future: Fifty years of promoting literacy*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2017). *Reading the past, writing the future: Fifty years of promoting literacy*. UNESCO Publishing.



- Wahab, S. A. (2016). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- World Bank. (2017). *World development report 2017: Governance and the law*. World Bank Publications.